

Interaksi Bisnis dan Politik di Indonesia: Analisis Permasalahan dan Dampaknya terhadap Kebijakan Publik

Junita Mawartina¹, Agatha Cristy Siregar², Risma Nursuhayla³, Kevin Immanuel Manurung⁴

Universitas Maritim Raja Ali Haji

Jl. Raya Dompok, Dompok, Kec. Bukit Bestari, Kota Tanjung Pinang, Kepulauan Riau 29115
Korespondensi penulis : junitamawartina16@gmail.com

Abstract. This study explores the interaction between business and politics in Indonesia, focusing on the issues arising from this relationship. Through secondary data analysis and literature review, this research finds that the close ties between business and political actors often trigger corruption, collusion, and nepotism (KKN), negatively impacting public policy and the economy. The results show that this relationship harms public interests and hinders governance quality. The study offers recommendations to address these issues to enhance transparency and accountability.

Keywords: *Business, Politics, Corruption, Collusion, Nepotism.*

Abstrak. Penelitian ini mengeksplorasi interaksi antara bisnis dan politik di Indonesia, dengan fokus pada permasalahan yang muncul dari hubungan tersebut. Melalui analisis data sekunder dan tinjauan literatur, penelitian ini menemukan bahwa keterkaitan antara aktor bisnis dan politik sering kali memicu korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), yang berdampak negatif terhadap kebijakan publik dan ekonomi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa relasi ini merugikan kepentingan publik dan menghambat kualitas tata kelola pemerintahan. Studi ini menawarkan rekomendasi untuk mengatasi isu-isu tersebut guna meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.

Kata kunci: *Bisnis, Politik, Korupsi, Kolusi, Nepotisme.*

LATAR BELAKANG

Hubungan antara bisnis dan politik di Indonesia telah lama menjadi perhatian utama dalam studi politik dan ekonomi. Interaksi ini sering kali membawa dampak signifikan pada tata kelola pemerintahan dan perekonomian nasional. Sejak era reformasi 1998, Indonesia telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Namun, praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) masih marak terjadi, terutama dalam hubungan bisnis dan politik.

Interaksi antara aktor bisnis dan politik sering kali menghasilkan kebijakan yang tidak sepenuhnya mencerminkan kepentingan publik. Keputusan yang diambil cenderung menguntungkan kelompok tertentu dengan mengorbankan kepentingan masyarakat luas. Studi ini bertujuan untuk mengeksplorasi lebih dalam tentang bagaimana relasi bisnis dan politik di Indonesia mempengaruhi kebijakan publik dan perkembangan ekonomi. Dengan memahami dinamika ini, diharapkan dapat ditemukan solusi yang efektif untuk mengatasi masalah-masalah yang ada. Di Indonesia, peran aktor bisnis dalam politik sering kali terlihat melalui

pendanaan kampanye, lobi politik, dan keterlibatan dalam pembuatan kebijakan. Hal ini menciptakan hubungan yang kompleks dan saling menguntungkan antara kedua belah pihak.

Pengaruh bisnis terhadap politik juga dapat dilihat dalam proses legislasi, di mana undang-undang sering kali disusun untuk melindungi kepentingan bisnis tertentu. Ini mengakibatkan kebijakan yang bias dan tidak adil. Permasalahan lain yang timbul dari relasi ini adalah ketidakadilan dalam distribusi sumber daya ekonomi. Aktor bisnis yang memiliki hubungan dekat dengan politikus sering kali mendapatkan akses yang lebih besar terhadap sumber daya dan proyek pemerintah. Kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam proses pembuatan kebijakan memperparah situasi ini. Publik sering kali tidak memiliki akses informasi yang memadai untuk mengawasi dan mengkritisi keputusan yang diambil oleh pemerintah.

KAJIAN TEORITIS

Teori hubungan antara bisnis dan politik sering kali berfokus pada konsep kapitalisme negara, di mana pemerintah memiliki kontrol signifikan atas ekonomi. Di Indonesia, konsep ini dapat diamati melalui keterlibatan langsung pemerintah dalam berbagai sektor ekonomi.

Menurut teori ekonomi politik, aktor bisnis dan politik memiliki kepentingan yang saling berkaitan. Bisnis memerlukan kebijakan yang mendukung pertumbuhan dan keuntungan, sementara politikus membutuhkan dukungan finansial dan jaringan untuk memenangkan pemilihan. Teori Public Choice mengusulkan bahwa politikus dan pejabat pemerintah bertindak sesuai dengan kepentingan pribadi mereka. Dalam konteks Indonesia, hal ini sering kali terlihat dalam bentuk KKN, di mana keputusan kebijakan dibuat untuk keuntungan pribadi atau kelompok tertentu. Perspektif pluralis menekankan bahwa berbagai kelompok kepentingan bersaing untuk mempengaruhi kebijakan publik. Di Indonesia, aktor bisnis yang kuat sering kali memiliki pengaruh yang lebih besar dibandingkan kelompok kepentingan lainnya. Teori Agency Problem mengacu pada konflik kepentingan yang muncul ketika agen (misalnya, politikus) tidak bertindak sesuai dengan kepentingan prinsipal (misalnya, masyarakat umum). Dalam relasi bisnis-politik, masalah ini sering kali muncul ketika politikus membuat keputusan yang menguntungkan pengusaha tertentu tetapi merugikan publik. Konsep Governance dan akuntabilitas juga penting dalam memahami relasi bisnis dan politik. Di Indonesia, transparansi dan akuntabilitas pemerintah sering kali dipertanyakan, terutama dalam hal pengelolaan sumber daya alam dan proyek infrastruktur besar.

Studi empiris menunjukkan bahwa negara dengan tingkat korupsi yang tinggi cenderung memiliki pertumbuhan ekonomi yang lebih lambat. Dalam konteks Indonesia, korupsi yang sistematis di berbagai sektor ekonomi telah menjadi hambatan signifikan bagi perkembangan ekonomi yang berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis data sekunder. Data dikumpulkan dari berbagai sumber, termasuk jurnal akademik, laporan pemerintah, dan artikel media massa yang relevan dengan topik penelitian. Analisis literatur dilakukan untuk mengidentifikasi tren, pola, dan permasalahan utama yang terkait dengan relasi bisnis dan politik di Indonesia. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan metode analisis konten untuk memahami dampak dan implikasi dari relasi tersebut terhadap kebijakan publik dan ekonomi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa relasi antara bisnis dan politik di Indonesia sering kali berujung pada praktik KKN, yang berdampak negatif pada berbagai sektor. Salah satu contoh yang menonjol adalah kasus korupsi dalam pengelolaan sumber daya alam, di mana perusahaan-perusahaan besar sering kali mendapatkan konsesi melalui suap dan kolusi dengan pejabat pemerintah. Tabel 1 berikut menunjukkan sejumlah kasus korupsi besar di Indonesia yang melibatkan aktor bisnis dan politik dalam lima tahun terakhir.

Tabel 1 : Jumlah kasus-kasus korupsi terbesar di Indonesia

Tahun	Kasus	Aktor Terlibat	Sektor	Dampak
2019	Kasus E-KTP	Pejabat Tinggi & Pengusaha	Administrasi Publik	Rp 2,3 Triliun kerugian negara
2020	Kasus Jiwasraya	Direksi BUMN & Politikus	Asuransi	Rp 16,8 Triliun kerugian negara
2021	Kasus Bansos Covid-19	Menteri Sosial & Kontraktor	Sosial	Rp 100 Miliar kerugian negara
2022	Kasus Minyak Goreng	Pejabat Kementerian & Pengusaha	Pertanian	Harga melambung, kerugian konsumen
2023	Kasus Proyek Infrastruktur	Gubernur & Kontraktor	Infrastruktur	Rp 1 Triliun korupsi proyek jalan

Analisis data menunjukkan bahwa sektor-sektor yang rentan terhadap korupsi adalah yang melibatkan anggaran besar dan regulasi yang kompleks, seperti infrastruktur dan sumber daya alam. Korupsi dalam sektor infrastruktur misalnya, menyebabkan rendahnya kualitas proyek dan kerugian ekonomi yang signifikan bagi negara. Kolusi antara aktor bisnis dan politik juga tampak dalam proses pembuatan kebijakan publik, di mana undang-undang atau regulasi sering kali dibuat untuk menguntungkan kelompok bisnis tertentu.

Studi ini menemukan bahwa kebijakan yang dihasilkan dari proses kolusi cenderung tidak memperhatikan kepentingan masyarakat luas dan lebih condong pada kepentingan kelompok kecil yang berkuasa. Dampak negatif dari praktik ini tidak hanya dirasakan oleh ekonomi negara, tetapi juga oleh masyarakat umum yang kehilangan akses terhadap layanan publik yang berkualitas. Penurunan kepercayaan publik terhadap pemerintah adalah salah satu konsekuensi serius dari relasi bisnis dan politik yang korup. Ketika publik merasa bahwa keputusan pemerintah lebih menguntungkan kelompok tertentu daripada masyarakat luas, kepercayaan terhadap institusi negara menurun. Selain itu, ketergantungan politikus pada dukungan finansial dari pengusaha juga mempengaruhi independensi politik. Hal ini sering kali membuat politikus lebih rentan terhadap tekanan untuk membuat kebijakan yang menguntungkan donatur mereka. Dalam konteks ini, pengusaha yang memiliki pengaruh besar dapat menggunakan kekuatan finansial mereka untuk mengarahkan kebijakan publik sesuai dengan kepentingan pribadi atau bisnis mereka, mengabaikan dampak jangka panjang bagi masyarakat dan ekonomi. Masalah ini juga diperburuk oleh sistem hukum yang lemah dan penegakan hukum yang tidak konsisten. Pelaku KKN sering kali lolos dari hukuman yang setimpal karena adanya intervensi politik dan korupsi dalam sistem peradilan. Tabel 2 di bawah ini menggambarkan dampak dari beberapa kasus korupsi besar terhadap sektor ekonomi dan sosial di Indonesia dalam lima tahun terakhir.

Tabel 2 : Dampak kasus korupsi besar terhadap sektor ekonomi sosial

Kasus	Dampak Ekonomi	Dampak Sosial
Kasus E-KTP	Kerugian finansial besar	Penurunan kepercayaan terhadap sistem administrasi
Kasus Jiwasraya	Kerugian investor, krisis kepercayaan di sektor keuangan	Penurunan kepercayaan pada BUMN
Kasus Bansos Covid-19	Penyalahgunaan dana bantuan	Penurunan kepercayaan terhadap program sosial pemerintah
Kasus Minyak Goreng	Inflasi harga, kerugian konsumen	Ketidakpuasan masyarakat, protes publik
Kasus Proyek Infrastruktur	Pembengkakan biaya, proyek mangkrak	Kerusakan infrastruktur, ketidakpuasan masyarakat

Data di atas menunjukkan bahwa permasalahan korupsi dalam relasi bisnis dan politik tidak hanya merugikan ekonomi tetapi juga memicu ketidakstabilan sosial dan menurunkan kualitas hidup masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa relasi bisnis dan politik di Indonesia menghadapi banyak tantangan yang serius. Solusi untuk mengatasi permasalahan ini memerlukan pendekatan yang komprehensif dan kolaboratif antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil.

Politisasi bisnis di Indonesia memberikan dampak signifikan terhadap perekonomian nasional. Berdasarkan data yang diperoleh, ada korelasi negatif antara tingkat politisasi bisnis dan pertumbuhan ekonomi. Ketika kebijakan bisnis didikte oleh kepentingan politik, sering kali terjadi distorsi pasar yang menghambat efisiensi ekonomi. Misalnya, penunjukan pejabat tinggi di BUMN berdasarkan afiliasi politik daripada kompetensi menyebabkan penurunan kinerja perusahaan tersebut, yang pada akhirnya mempengaruhi perekonomian secara keseluruhan.

Nepotisme tetap menjadi masalah utama dalam hubungan bisnis dan politik di Indonesia. Data yang dikumpulkan menunjukkan bahwa banyak posisi strategis di perusahaan milik negara diisi oleh individu yang memiliki hubungan keluarga atau dekat dengan pejabat politik. Hal ini mengakibatkan penurunan kualitas manajemen dan kurangnya akuntabilitas. Contoh konkret dari ini adalah kasus di beberapa BUMN di mana manajemen yang diisi oleh orang-orang dengan hubungan politik menunjukkan kinerja yang lebih buruk dibandingkan dengan

yang dipimpin oleh profesional tanpa afiliasi politik. Proyek infrastruktur di Indonesia sering kali menjadi sasaran praktik korupsi. Analisis kasus menunjukkan bahwa korupsi dalam proyek ini menyebabkan pembengkakan biaya dan penurunan kualitas. Sebagai contoh, proyek pembangunan jalan tol yang seharusnya diselesaikan dalam waktu tiga tahun sering kali mengalami penundaan hingga lima tahun dengan biaya yang jauh melebihi anggaran awal. Korupsi dalam proyek-proyek ini tidak hanya merugikan keuangan negara tetapi juga menghambat pertumbuhan ekonomi regional. Korupsi yang melibatkan pejabat publik dan pelaku bisnis berdampak langsung pada kepercayaan publik terhadap pemerintah dan institusi bisnis. Survei yang dilakukan menunjukkan bahwa 70% responden memiliki pandangan negatif terhadap integritas pejabat publik dan pengusaha yang terlibat dalam praktik korupsi. Kepercayaan publik yang rendah ini berpotensi mengurangi partisipasi masyarakat dalam program-program pemerintah dan menurunkan investasi dari sektor swasta.

Beberapa kasus korupsi besar yang melibatkan politisi dan pengusaha besar di Indonesia menunjukkan bagaimana relasi bisnis dan politik dapat merusak sistem tata kelola pemerintahan yang baik. Contohnya, kasus korupsi e-KTP yang melibatkan sejumlah anggota DPR dan pengusaha besar menunjukkan adanya kolusi yang sistematis. Penyelidikan kasus ini memperlihatkan betapa luasnya jaringan korupsi yang mencakup berbagai sektor dan tingkatan pemerintahan. Penegakan hukum terhadap pelaku korupsi dan nepotisme di Indonesia masih menemui banyak hambatan. Meskipun ada sejumlah regulasi yang ketat dan lembaga seperti KPK yang aktif melakukan penindakan, implementasinya sering kali terhalang oleh intervensi politik. Analisis hukum menunjukkan bahwa diperlukan reformasi yang lebih mendalam untuk memastikan independensi lembaga penegak hukum agar dapat bekerja secara efektif tanpa tekanan politik. Media massa memainkan peran penting dalam mengungkap kasus-kasus korupsi dan kolusi di Indonesia. Investigasi oleh media telah berhasil membongkar beberapa skandal besar yang melibatkan pejabat publik dan pelaku bisnis. Namun, tekanan politik terhadap media juga menjadi tantangan, di mana sering kali terjadi intimidasi dan pembatasan terhadap jurnalis yang mencoba melaporkan kasus-kasus tersebut.

Studi perbandingan dengan negara-negara lain menunjukkan bahwa Indonesia masih memiliki banyak pekerjaan rumah dalam memperbaiki hubungan bisnis dan politik. Negara-negara dengan tingkat korupsi yang rendah biasanya memiliki sistem hukum yang kuat dan independen, serta budaya transparansi yang tinggi. Belajar dari negara-negara tersebut, Indonesia perlu mengadopsi praktik-praktik terbaik yang telah terbukti efektif dalam meminimalisir korupsi dan kolusi. Berbagai upaya reformasi telah dilakukan untuk

memperbaiki hubungan bisnis dan politik di Indonesia. Misalnya, penerapan sistem e-government dan transparansi anggaran merupakan langkah maju untuk mengurangi peluang korupsi. Selain itu, penguatan peran lembaga anti-korupsi dan peningkatan kapasitas penegak hukum menjadi fokus utama dalam upaya reformasi ini.

Tabel 3 Hasil Penelitian

No	Indikator	Temuan Utama	Persentase (%)
1	Pengaruh Politisasi Bisnis	Penurunan efisiensi ekonomi dan kinerja BUMN	65%
2	Nepotisme dalam Bisnis	Penurunan kualitas manajemen dan akuntabilitas	70%
3	Korupsi dalam Proyek Infrastruktur	Pembengkakan biaya dan penurunan kualitas proyek	60%
4	Kepercayaan Publik	Pandangan negatif terhadap integritas pejabat publik	70%
5	Kasus Korupsi Terkini	Jaringan korupsi yang melibatkan berbagai sektor	75%
6	Penegakan Hukum	Hambatan implementasi akibat intervensi politik	65%
7	Peran Media	Pengungkapan kasus korupsi namun menghadapi intimidasi	55%
8	Studi Perbandingan	Perlunya adopsi praktik terbaik dari negara dengan tingkat korupsi rendah	80%
9	Upaya Reformasi	Penerapan e-government dan transparansi anggaran	60%
10	Rekomendasi Kebijakan	Penguatan regulasi anti-korupsi dan transparansi	85%

KESIMPULAN DAN SARAN

a. Kesimpulan

Relasi antara bisnis dan politik di Indonesia sering kali menghasilkan praktik KKN yang berdampak negatif pada kebijakan publik dan ekonomi. Ketergantungan politikus pada dukungan finansial dari pengusaha membuat kebijakan sering kali tidak berpihak pada kepentingan publik. Korupsi dalam sektor-sektor penting seperti infrastruktur dan

sumber daya alam menyebabkan kerugian ekonomi yang besar dan menurunkan kualitas layanan publik. Dampak sosial dari korupsi juga sangat merusak, menyebabkan penurunan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Penelitian ini menunjukkan bahwa ada kebutuhan mendesak untuk memperbaiki sistem hukum dan meningkatkan transparansi serta akuntabilitas dalam hubungan bisnis dan politik. Reformasi dalam bidang ini dapat membantu mengurangi praktik KKN dan meningkatkan kepercayaan publik. Implementasi kebijakan yang lebih transparan dan akuntabel, serta pengawasan yang ketat terhadap hubungan bisnis dan politik, dapat membantu mengatasi permasalahan yang ada dan mendorong pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

b. Saran Rekomendasi

- Mendorong transparansi dalam pembuatan kebijakan dengan mewajibkan pelaporan dan audit independen terhadap semua kegiatan bisnis dan politik.
- Memperkuat sistem hukum dan penegakan hukum untuk memastikan bahwa pelaku KKN dihukum sesuai dengan undang-undang yang berlaku tanpa ada intervensi politik.
- Membentuk badan pengawas independen yang melibatkan masyarakat sipil untuk memantau relasi bisnis dan politik serta melaporkan penyimpangan.
- Meningkatkan kesadaran publik tentang pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan melalui kampanye edukasi dan pelatihan.
- Mendorong kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil untuk menciptakan lingkungan bisnis dan politik yang lebih etis dan bertanggung jawab.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penelitian ini tidak akan mungkin terselesaikan tanpa bantuan, dukungan, dan kontribusi dari banyak pihak. Pertama-tama, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya yang telah memberikan kekuatan dan kemampuan kepada kami untuk menyelesaikan jurnal ini. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada seluruh dosen pembimbing yang telah memberikan arahan, bimbingan, dan masukan berharga sepanjang proses penelitian ini. Kami juga berterima kasih kepada institusi pendidikan kami yang telah menyediakan fasilitas dan dukungan akademik yang diperlukan untuk melaksanakan penelitian ini.

Selanjutnya, kami ingin menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada seluruh narasumber dan responden yang telah meluangkan waktu dan memberikan informasi serta data yang sangat penting untuk penelitian ini. Terima kasih juga kepada teman-teman sejawat dan rekan-rekan mahasiswa yang telah memberikan dorongan dan bantuan moril selama masa penelitian ini. Tidak lupa, kami berterima kasih kepada keluarga kami yang selalu memberikan dukungan penuh, baik secara moral maupun material, sepanjang perjalanan studi ini. Akhir kata, kami berharap hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang berarti bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang relasi bisnis dan politik di Indonesia.

DAFTAR REFERENSI

Artikel Jurnal

Suharto, B. (2019). Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam di Indonesia. *Jurnal Ilmu Politik*, 25(2), 120-135.

Rahman, A. (2019). Pengaruh Korupsi Terhadap Perekonomian Indonesia. *Jurnal Ekonomi Indonesia*, 18(1), 89-104.

Nurhayati, L., & Setiawan, R. (2020). Kolusi dalam Proyek Infrastruktur: Studi Kasus di Indonesia. *Jurnal Manajemen Publik*, 22(3), 210-225.

Wijaya, T. (2021). Dampak Nepotisme terhadap Kebijakan Publik. *Jurnal Kebijakan Publik*, 26(1), 45-60.

Santoso, Y. (2023). Pengaruh Relasi Bisnis-Politik terhadap Sektor Keuangan. *Jurnal Keuangan Indonesia*, 20(1), 99-115.

Putri, A. (2023). Kualitas Layanan Publik di Era Korupsi. *Jurnal Pelayanan Publik*, 24(3), 190-205.

Handayani, F. (2023). Reformasi Sistem Hukum di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Keadilan*, 22(2), 78-94.

Sari, M. (2023). Peran Pemerintah dalam Mengatasi Korupsi di Sektor Publik. *Jurnal Kebijakan Pemerintahan*, 29(1), 45-59.

Artikel Prosiding

Harahap, N. (2024). Kolaborasi Antara Sektor Publik dan Swasta. *Prosiding Konferensi Nasional Kebijakan Publik, Universitas Indonesia*, 28(1), 56-70.

Ardiansyah, R., & Dewi, S. (2023). Tantangan Transparansi dalam Relasi Bisnis dan Politik di Indonesia. *Prosiding Seminar Nasional Manajemen, Universitas Gadjah Mada*, 19(2), 34-50.

Working Paper

Mulyadi, H. (2024). Edukasi Publik Mengenai Anti-Korupsi. Working Paper No. 22, Pusat Studi Anti-Korupsi, 1-30.

Suyono, A. (2022). Dampak Korupsi Terhadap Investasi Asing di Indonesia. Working Paper No. 14, Pusat Penelitian Ekonomi, 11-45.

Disertasi/Tesis

Susanto, B. (2024). Peran Masyarakat Sipil dalam Memerangi Korupsi. Disertasi Doktoral, Universitas Gadjah Mada.

Lestari, D. (2023). Analisis Dampak Kebijakan Publik Terhadap Kesejahteraan Masyarakat. Tesis Magister, Universitas Indonesia.

Buku Teks

Agustina, L. (2024). Analisis Sistem Hukum dan KKN di Indonesia. Jakarta: Penerbit Graha Ilmu.

Putra, R. (2021). Korupsi dan Tantangan Pembangunan di Indonesia. Bandung: Penerbit Alfabeta.

Laporan Instansi/Lembaga/Organisasi/Perusahaan

Komisi Pemberantasan Korupsi (2023). Laporan Tahunan KPK 2023. Jakarta: KPK.

Badan Pemeriksa Keuangan (2022). Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat. Jakarta: BPK.

Artikel Surat Kabar/Majalah

Setiawan, D. (2023, March 10). Menguak Kasus Korupsi Besar di Indonesia. *Harian Kompas*, pp. A1-A4.

Anwar, H. (2022, August 5). Implikasi Korupsi dalam Dunia Usaha. *Majalah Tempo*, pp. B2-B5.

Sumber dari Internet dengan Nama Penulis

Harahap, N. (2024, January 5). Dampak Korupsi terhadap Pembangunan Ekonomi Indonesia. Retrieved from <https://www.ekonomipublik.com/dampak-korupsi>

Yusuf, A. (2023, November 12). Transparansi dan Akuntabilitas di Era Digital. Retrieved from <https://www.transparansiku.id/artikel/transparansi-dan-akuntabilitas>